

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008, pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sesuai dengan Undang-Undang ini; usaha besar adalah usaha yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. UMKM terbukti mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Kontribusi besar UMKM meliputi penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan terutama menjadi penahan saat terjadinya guncangan krisis ekonomi (Krisjayanti dkk, 2019: 2). Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020 menunjukkan jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 64 Juta Unit (Liputan6.com). Dari jumlah tersebut, UMKM memiliki pangsa sebesar 99% (Krisjayanti dkk, 2019: 2). Data tersebut membuktikan bahwa UMKM merupakan pasar yang potensial bagi industri jasa keuangan terutama bank untuk

menyalurkan pembiayaan. Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan permodalan UMKM dengan memberikan dukungan fasilitas pembiayaan yang berasal dari perbankan. Dukungan pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui alokasi anggaran pemberian jaminan kredit dalam Program Kredit Usaha Rakyat (Kemenkeu, 2015).

UMKM tidak selalu berjalan mulus meskipun memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian Indonesia. Pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam menjalankan bisnisnya. Menurut Bank Indonesia (2015:19), UMKM masih memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank, baik karena kendala teknis (misalnya tidak mempunyai/tidak cukup agunan), maupun kendala non teknis (misalnya keterbatasan akses informasi perbankan). Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain ternyata perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai. UMKM saat ini hanya menggunakan modal pribadi dalam menjalankan usaha mereka walaupun pemerintah telah mengupayakan banyak program dalam bidang permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diperoleh melalui bank tertentu. Alasan UMKM tidak menggunakan modal dari pemberi kredit yaitu karena skala usaha yang masih kecil dan lama usaha masih baru (1-3tahun). Alasan lainnya adalah rumitnya persyaratan yang diberikan pihak pemberi kredit, misalnya adanya kewajiban UMKM dalam

menyediakan laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan sesungguhnya. Akan tetapi, banyak UMKM yang tidak menyediakan laporan keuangan dalam usahanya. Hal tersebut disebabkan UMKM terlalu fokus pada proses produksi dan operasionalnya sehingga tidak memperhatikan pencatatan atau pembukuan (Putra dan Kurniawati,2012).

Saat ini, populasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih didominasi oleh usaha mikro yaitu 98.70% dan sisanya usaha kecil dan menengah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang memiliki jumlah aset dan omset yang besar masih sangat rendah. Kemampuan teknis serta sulitnya akses ke pembiayaan menjadi hambatan UMKM dalam mengembangkan kapasitas dan skala bisnisnya. Mayoritas pelaku UMKM masih memiliki kendala dalam mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit yaitu salah satunya laporan keuangan yang *bankable*. Dalam memenuhi kebutuhan penyusunan laporan keuangan UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengeluarkan standar pelaporan yang lebih sederhana bagi UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). SAK EMKM dinilai mampu untuk membantu UMKM mencapai literasi keuangan dan mengoptimalkan kinerjanya khususnya dalam hal mencari pendanaan. Namun, implementasi SAK EMKM masih menjadi pekerjaan yang tidak mudah dikalangan UMKM. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya pencatatan keuangan dan pembukuan yang baik (Kompas.com, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Putra pada tahun 2018, menunjukkan

bahwa hanya 34% pelaku UMKM yang telah mampu menyediakan laporan keuangan sesuai SAK dan sebanyak 74% pelaku UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM. Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) membeberkan alasan UMKM sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, salahsatunya karena UMKM tidak memiliki pembukuan laporan keuangan (Supriyatna dan Fauzi,2019).

Sama halnya berdasarkan observasi awal yang peneliti dapatkan di lapangan selama melakukan KKN merdeka, bahwa UMKM yang ada di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango belum menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah (SAK EMKM). Saat ini dasar pedoman yang digunakan adalah SAK ETAP, akan tetapi seiringnya dengan kebutuhan yang semakin banyak, serta kendala yang dialami oleh pelaku UMKM, IAI mengeluarkan standar khusus yang digunakan untuk pelaku bisnis UMKM. Standar tersebut adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Standar ini merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP, dimana laporan keuangannya juga memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh pelaku bisnis. Dengan adanya SAK EMKM ini tentu diharapkan tidak hanya berdampak positif bagi UMKM dalam segi menyiapkan laporan keuangan, tetapi UMKM lebih maju dan mandiri. Selain itu untuk jangka panjang penyederhanaan SAK EMKM ini diharapkan dapat menghilangkan anggapan negatif pelaku usaha yang menganggap bahwa proses pencatatan keuangan dalam akuntansi hingga menjadi laporan keuangan merupakan hal yang sulit. Dalam mengimplementasikan SAK EMKM secara

keseluruhan adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesiapan dari pelaku UMKM.

Namun demikian dalam penelitian ini menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menerapkan SAK EMKM yang sebelumnya mengenai penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu: pendidikan pemilik UMKM, sosialisasi SAK EMKM bagi pemilik UMKM dan persepsi pemilik UMKM terhadap SAK EMKM. Untuk selanjutnya ketiga variabel ini disebut pendidikan, sosialisasi dan persepsi. Variabel dependen yaitu laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM) yang selanjutnya disebut laporan keuangan.

Pendidikan adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia, untuk meningkatkan kemampuan diri agar lebih baik dari sebelumnya dan agar dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bersikap dan bertingkah laku (Rizkhi 2019: 25). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Romy Eka Putra A (2018) secara parsial variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penerapan SAK EMKM pada UMKM. Demikian juga Risal dan Endang Kristiawati (2020) menunjukkan hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap implementasi atau penerapan pencatatan laporan keuangan UMKM di Kota Pontianak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM yaitu sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak

terkait tentang SAK EMKM. Hal tersebut perlu karena pada saat observasi awal penelitian masih banyak para pelaku UMKM yang kurang memiliki pemahaman tentang akuntansi sehingga mereka tidak menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM serta dengan adanya sosialisasi persepsi para pelaku UMKM akan berubah sehingga dapat mendorong mereka menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Pendapat tersebut sejalan dengan Pertiwi, Rohendi, dan Setiawan (2020) yang menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi tentang SAK EMKM kepada para pelaku UMKM akan meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM dalam menerapkan SAK EMKM. Bella Silvia dan FikaAzmi (2019) juga menunjukkan bahwa bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi persepsi pengusaha UMKM tentang perusahaan pentingnya laporan keuangan berbasis SAK EMKM.

Dalam penelitian Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) membuktikan secara parsial sosialisasi SAK ETAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggunaan SAK ETAP. Demikian juga dengan hasil penelitian Janrosl (2018) dan Badria dan Diana (2018) bahwa Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh 8 signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Akan tetapi dalam penelitian Febriyanti dan Wardhani (2018) sosialisasi tidak terbukti memiliki pengaruh yang positif terhadap penerapan SAK EMKM.

Tidak hanya tingkat pemahaman, faktor selanjutnya bagi UMKM dalam menerapkan SAK EMKM yaitu Persepsi para pelaku UMKM. Hal tersebut terjadi karena pada saat observasi awal penelitian banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa menyusun laporan keuangan yang sesuai SAK EMKM

tersebut sulit dan memakan waktu serta biaya. Pendapat ini sejalan dengan Kusuma dan Lutfiany (2018) Persepsi pelaku UMKM juga mempengaruhi implementasi SAK EMKM karena setiap pemilik UMKM memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai penggunaan SAK yang berlaku. Dalam hasil penelitian Badria dan Diana (2018) persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap penggunaan SAK EMKM. Demikian juga dengan penelitian Kusuma dan Lutfiany (2018) persepsi UMKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Akan tetapi dalam hasil penelitian Janrosli (2018) menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK EMKM. Demikian juga dalam penelitian Pertama dan Sutapa (2020) menyatakan bahwa Persepsi pelaku UMKM tidak berpengaruh terhadap Penerapan SAK EMKM di kota Denpasar

Dengan melihat fenomena diatas, penulis tertarik untuk membuktikan apakah ada atau tidaknya pengaruh dari variabel-variabel tersebut pada penelitian ini. Berhubung juga variabel-variabel tersebut masih ada hasil yang belum konsisten pada penelitian-penelitian sebelumnya. maka judul penelitian ini adalah: **“Pengaruh Pendidikan, Sosialisasi dan Persepsi terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (Studi Pada Pelaku UMKM Di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan pemilik UMKM tidak cukup untuk memahami pentingnya laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
2. Kurangnya sosialisasi SAK EMKM kepada pemilik UMKM.
3. Persepsi Pemilik UMKM kurang baik akan pentingnya laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?
2. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?
3. Apakah persepsi berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?
4. Apakah pendidikan, sosialisasi dan persepsi berpengaruh terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi UMKM terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, sosialisasi dan persepsi terhadap penyusunan Laporan Keuangan UMKM sesuai SAK EMKM pada pelaku UMKM di Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian menggunakan teori kepatuhan (*compliance theory*) ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Dengan demikian manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

UMKM dalam menyusun laporan keuangan. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM dalam menyusun laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemilik UMKM. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemilik UMKM dalam menyusun laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK EMKM.
- b. Bagi Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dalam menyusun grand design tentang program kegiatan terkait UMKM.